PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. Kartini No. 33 Semarapura. Telpon : (0366) 23969
SEMARAPURA

BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

SATU DATA RISET
DAN INOVASI
DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG

LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Oktober 2025

JUDUL

"Klungkung Green–Blue Economy Hub: Ekosistem Terpadu Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Kelestarian Darat dan Laut"

Fokus Strategis

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan, Bidang Pariwisata, Bidang Pertanian

Tim Ahli

I Wayan Subamia, SE

Anggota Tim Pengendali Mutu

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung
Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Kabupaten Klungkung memiliki keunggulan komparatif yang kuat pada sumber daya darat dan laut yang saling terhubung, khususnya di wilayah kepulauan Nusa Penida–Lembongan–Ceningan dan kawasan daratan Semarapura. Sumber daya tersebut meliputi pariwisata bahari, perikanan, ekosistem pesisir, pertanian lokal, UMKM berbasis budaya, serta ekonomi kreatif. Namun demikian, pemanfaatan potensi tersebut selama ini cenderung terfragmentasi, berorientasi jangka pendek, dan belum sepenuhnya berkelanjutan, sehingga nilai tambah ekonomi yang dinikmati masyarakat lokal masih terbatas.

Model pembangunan ekonomi yang terlalu bertumpu pada eksploitasi sumber daya—baik darat maupun laut—berisiko menurunkan daya dukung lingkungan, memperlemah ketahanan ekonomi lokal, dan meningkatkan kerentanan sosial, khususnya pada sektor pariwisata massal. Di sisi lain, tuntutan global dan nasional mengarah pada pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan, sebagaimana tercermin dalam konsep green economy dan blue economy.

Dalam konteks Klungkung, kedua konsep tersebut tidak dapat dipisahkan. Aktivitas ekonomi darat (green economy) seperti pertanian lokal, UMKM, dan ekonomi kreatif memiliki keterkaitan langsung dengan ekonomi laut dan pesisir (blue economy) seperti pariwisata bahari, perikanan, dan jasa lingkungan. Tanpa integrasi kebijakan dan pengelolaan, potensi ekonomi tersebut berisiko berkembang secara parsial dan tidak berkelanjutan. Oleh karena

itu, diperlukan sebuah inovasi kebijakan yang mampu mengorkestrasi seluruh potensi ekonomi darat dan laut dalam satu ekosistem terpadu yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud dari gagasan Klungkung Green–Blue Economy Hub adalah membangun sebuah ekosistem pengembangan ekonomi lokal yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis potensi khas Klungkung, dengan menempatkan kelestarian lingkungan darat dan laut sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Tujuan dari inovasi ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal tanpa merusak daya dukung lingkungan, memperkuat peran masyarakat dan UMKM sebagai pelaku utama ekonomi daerah, serta menciptakan struktur ekonomi yang lebih tangguh terhadap guncangan eksternal. Selain itu, inovasi ini bertujuan memperkuat posisi Klungkung sebagai daerah percontohan pengembangan ekonomi hijau–biru di Bali Timur yang selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan dan ekonomi kerakyatan.

II. Ide dan Gagasan

Klungkung Green–Blue Economy Hub dirancang sebagai sebuah ekosistem kebijakan dan kelembagaan yang mengintegrasikan pengembangan ekonomi lokal berbasis darat (green economy) dan laut (blue economy) dalam satu kerangka pembangunan daerah yang berkelanjutan. Gagasan ini berangkat dari pemahaman bahwa struktur ekonomi Klungkung tidak dapat dipisahkan antara darat dan laut, karena aktivitas ekonomi pariwisata, perikanan, pertanian lokal, UMKM, dan ekonomi kreatif saling terhubung dalam satu rantai nilai wilayah.

Berbeda dengan pendekatan sektoral konvensional, Green–Blue Economy Hub tidak diposisikan sebagai proyek fisik semata atau kawasan ekonomi baru, melainkan sebagai pusat orkestrasi (hub) yang menyelaraskan kebijakan, program, pelaku usaha, dan komunitas lokal agar bergerak dalam satu arah pembangunan yang sama. Pemerintah daerah berperan sebagai orchestrator of ecosystem, bukan sekadar pelaksana program, dengan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi selalu berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Secara konseptual, green economy dalam konteks Klungkung mencakup penguatan ekonomi daratan yang berbasis efisiensi sumber daya, nilai tambah lokal, dan keberlanjutan lingkungan, seperti pertanian ramah lingkungan, UMKM berbasis budaya dan kerajinan lokal, kuliner lokal, serta ekonomi kreatif. Sementara itu, blue economy mencakup pengelolaan pariwisata bahari berkelanjutan, perikanan ramah lingkungan, jasa ekosistem pesisir, serta aktivitas ekonomi laut yang menjaga kelestarian terumbu karang, pesisir, dan perairan laut.

Green–Blue Economy Hub berfungsi untuk menyatukan kedua spektrum ekonomi tersebut dalam satu rantai nilai terpadu (integrated local value chain). Produk dan jasa dari sektor green economy diarahkan untuk menjadi penopang utama sektor blue economy, khususnya pariwisata bahari. Produk pertanian lokal, hasil perikanan berkelanjutan, kerajinan dan produk kreatif

lokal tidak lagi diposisikan sebagai komoditas terpisah, tetapi sebagai bagian dari pengalaman wisata dan konsumsi lokal yang bernilai tambah tinggi. Dengan demikian, kebocoran ekonomi keluar daerah dapat ditekan, dan manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh masyarakat Klungkung sendiri.

Dalam implementasinya, Green–Blue Economy Hub berperan sebagai fasilitator pengembangan usaha dan inovasi lokal, yang menghubungkan pelaku UMKM, nelayan, petani, pelaku pariwisata, dan komunitas kreatif dengan akses pembiayaan, pendampingan usaha, teknologi tepat guna, serta pasar. Hub ini mendorong transformasi pelaku ekonomi lokal dari sekadar produsen bahan mentah menjadi pelaku usaha bernilai tambah, tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan.

Gagasan ini juga menempatkan kelestarian lingkungan sebagai sumber daya ekonomi jangka panjang, bukan sebagai hambatan pembangunan. Melalui Green–Blue Economy Hub, praktik-praktik ramah lingkungan—seperti pengelolaan limbah usaha, efisiensi energi, perlindungan ekosistem laut, dan pemanfaatan sumber daya secara bijak—diposisikan sebagai competitive advantage. Usaha yang menerapkan prinsip keberlanjutan diarahkan untuk memperoleh pengakuan, insentif, dan preferensi pasar, sehingga tercipta insentif ekonomi yang selaras dengan tujuan konservasi.

Selain itu, Green–Blue Economy Hub dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat lokal sebagai pelaku utama ekonomi, bukan sekadar penonton. Masyarakat pesisir dan pedesaan didorong menjadi aktor utama dalam rantai nilai ekonomi hijau–biru, baik sebagai produsen, penyedia jasa, maupun pengelola destinasi berbasis komunitas. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menciptakan ketimpangan baru, tetapi justru meningkatkan kesejahteraan secara inklusif.

Dari perspektif tata kelola, Green–Blue Economy Hub menjadi instrumen integrasi kebijakan lintas sektor dan lintas wilayah. Hub ini menjembatani kebijakan pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, lingkungan hidup, dan ekonomi kreatif agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan demikian, arah pembangunan ekonomi Klungkung menjadi lebih konsisten, terkoordinasi, dan berorientasi jangka panjang.

Secara keseluruhan, Klungkung Green–Blue Economy Hub merupakan inovasi yang mengubah cara pandang pembangunan ekonomi daerah: dari eksploitasi sumber daya menuju pengelolaan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan, dari program sektoral menuju orkestrasi lintas sektor, serta dari pertumbuhan jangka pendek menuju ketahanan ekonomi dan lingkungan jangka panjang. Inovasi ini memberikan landasan kuat bagi Klungkung untuk tumbuh sebagai daerah dengan ekonomi lokal yang berdaya saing, berkeadilan, dan selaras dengan kelestarian darat dan laut.

Model Kelembagaan dan Tata Kelola Green–Blue Economy Hub

Agar Green–Blue Economy Hub tidak berhenti sebagai konsep normatif, diperlukan model kelembagaan yang jelas, luwes, dan mampu menjembatani berbagai kepentingan lintas sektor. Hub ini tidak harus dibentuk sebagai OPD baru, melainkan sebagai platform koordinasi kebijakan dan program yang berada di bawah kendali strategis pemerintah daerah.

Model kelembagaan Green–Blue Economy Hub dirancang sebagai forum orkestrasi lintas OPD dan pemangku kepentingan,

dengan pemerintah daerah berperan sebagai pengarah kebijakan, fasilitator kolaborasi, dan penjaga kepentingan publik.

Secara fungsional, hub ini menjalankan peran:

- penyelaras kebijakan sektor darat dan laut,
- penghubung pelaku ekonomi lokal dengan pasar dan pendukung usaha,
- pengawal prinsip keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi.

Aspek pendukung model kelembagaan:

- Koordinasi lintas OPD (pariwisata, perikanan, pertanian, UMKM, lingkungan hidup).
- Keterlibatan desa adat dan komunitas lokal sebagai aktor ekonomi.
- Kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta.
- Mekanisme pengambilan keputusan berbasis data dan dampak lingkungan–sosial.

Mekanisme Implementasi dan Alur Kerja Hub

Green–Blue Economy Hub bekerja melalui mekanisme end-to-end ecosystem facilitation, bukan intervensi program yang terputus-putus. Pemerintah daerah memfasilitasi pelaku ekonomi lokal sejak tahap perencanaan usaha hingga pengembangan pasar, dengan memastikan seluruh proses selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Mekanisme implementasi ini memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi yang tumbuh di Klungkung:

- memiliki nilai tambah lokal,
- tidak merusak lingkungan, dan
- memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

Aspek pendukung mekanisme implementasi:

- Identifikasi dan kurasi potensi usaha hijau–biru berbasis wilayah.
- Pendampingan usaha (legalitas, produksi, standardisasi).
- Integrasi pelaku lokal ke rantai pasok pariwisata dan pasar regional.
- Pemantauan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkala.

Pilot Project Strategis Green–Blue Economy Hub

Pilot Project 1: Pariwisata Bahari Berkelanjutan Nusa Penida.

Pilot project ini mengintegrasikan pariwisata bahari dengan produk dan jasa lokal berbasis keberlanjutan. Aktivitas wisata diarahkan untuk menggunakan produk lokal (pangan, kerajinan, jasa), sekaligus menerapkan standar perlindungan ekosistem laut. Pariwisata tidak hanya menjadi sumber kunjungan, tetapi juga mesin penggerak ekonomi lokal hijau–biru.

Pilot Project 2: UMKM Lokal Berbasis Green Supply Chain

UMKM daratan dan kepulauan difasilitasi untuk masuk ke rantai pasok pariwisata dan pasar regional dengan standar ramah lingkungan. Fokus utama pada kuliner lokal, kerajinan budaya, dan produk kreatif berbasis sumber daya lokal. Pendekatan ini memperkuat keterkaitan ekonomi darat–laut secara nyata.

Pilot Project 3: Perikanan Ramah Lingkungan dan Nilai Tambah

Nelayan dan pelaku perikanan didorong untuk menerapkan praktik penangkapan berkelanjutan serta pengolahan hasil laut bernilai tambah di tingkat lokal. Produk tidak lagi dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah untuk memenuhi kebutuhan

pasar wisata dan ekspor niche.

III. Rekomendasi

Untuk menjamin efektivitas implementasi Klungkung Green–Blue Economy Hub, diperlukan beberapa rekomendasi kebijakan strategis.

1. pemerintah daerah perlu menetapkan inovasi ini sebagai program prioritas lintas sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga memiliki legitimasi kebijakan dan dukungan anggaran yang memadai.
2. Diperlukan penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas OPD agar pengembangan ekonomi hijau–biru tidak berjalan parsial. Unit atau forum koordinasi khusus dapat dibentuk untuk memastikan sinkronisasi kebijakan pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan lingkungan hidup.
3. Pemerintah daerah perlu mendorong skema kemitraan dengan pelaku usaha, komunitas lokal, dan lembaga pendukung (perguruan tinggi, lembaga riset, dan lembaga pembiayaan) untuk mempercepat transfer pengetahuan, inovasi, dan akses pasar bagi pelaku ekonomi lokal.
4. Implementasi Green–Blue Economy Hub sebaiknya dimulai melalui pilot project pada sektor dan wilayah yang paling siap, seperti pariwisata bahari berkelanjutan di Nusa Penida dan UMKM berbasis budaya di daratan, sebelum direplikasi secara lebih luas.
5. Diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang tidak hanya mengukur pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dampak lingkungan dan sosial, sehingga keberhasilan inovasi ini dapat diukur secara komprehensif dan berkelanjutan.

Semarapura, 17 Desember 2025
Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-